

SAMBUTAN
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR

Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan dalam melaksanakan dan menuntaskan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang terbaik bagi permasalahan yang ada di Kota Makassar.

Penelitian dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Hasanuddin. Penelitian ini telah dilaksanakan sejak Februari – September 2022. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dalam buku ini kami harapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Makassar.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Walikota Makassar yang telah memberikan amanah dan kepercayaan Kepada Balitbangda Kota Makassar untuk melaksanakan penelitian-penelitian ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah atas upaya dan kerja kerasnya dalam menuntaskan tugasnya sejak tahap perencanaan hingga dengan penyusunan laporan hasil penelitian ini.

PENGANTAR REDAKSI

**KAJIAN STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM KOTA MAKASSAR
BERBASIS LORONG**

Dr.Andi Nur Bau Massepe, SE,MM

Yukiko Hiro Mantu, SE., M.Sc

Putri Zulfira Amirullah, SE., MM

H. Febrianto Syam, S.IP., M.I.P

Ismaniar Ismail, S.Sos.,M.Si

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

| | |
|-----------|---|
| | 32BAB 1. PENDAHULUAN |
| | 3Latar belakang |
| | 5Pernyataan Masalah |
| | 10Tujuan penelitian |
| | 11Manfaat Penelitian |
| 11 | BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA |
| | 12Konsep Entrepreneurship |
| | 12Usaha Mikro Kecil dan Menengah |
| | 13Badan Usaha Lorong (BULo) |
| 14 | BAB III. METODOLOGI PENELITIAN |
| | 16Desain Penelitian. |
| | 16Teknik Pengumpulan Data. |
| | 17Teknik Analisis Data |
| | 19Outcome penelitian |
| 19 | BAB IV. PEMBAHASAN |
| 20 | Persebaran Lokasi Usaha Kecil Dan Menengah Kota Makassar 2021 |
| 21 | Kebijakan Pengembangan UMKM Pemkot Makassar |
| 25 | Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar |
| 26 | Inovasi Program pengembangan UMKM |
| 27 | Permasalahan dihadapi Pemkot Makassar. |
| 28 | BAB V. Rekomendasi Kebijakan |
| 30 | DAFTAR PUSTAKA |
| 34 | LAMPIRAN-LAMPIRAN |
| 36 | LAMPIRAN 1 : Jadwal Kegiatan Penelitian. |
| 36 | LAMPIRAN 2. Profil Peneliti |
| 37 | LAMPIRAN 3. PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN |

38

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kajian ini memberikan rekomendasi program pengembangan UMKM pemerintah kota Makassar yang telah dilakukan. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur & metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada dinas yang terkait pengembangan UMKM, bertemu pelaku UMKM lorong di Kota Makassar.

Diawali dengan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM kota Makassar, yaitu faktor internal aspek tata kelola, pemasaran, manajemen keuangan, akses permodalan, ketersediaan bahan baku, aspek penting disini adalah mindset kewirausahaan yang masih rendah bagi pelaku UMKM. Ini tercermin dalam *Entrepreneur Behaviour* (Perilaku Kewirausahaan). Perilaku wirausaha didasarkan pada seperangkat nilai (kepercayaan) dan kebutuhan tertentu yang memberi individu motivasi intrinsik dan penentuan nasib sendiri untuk terlibat dalam perilaku kewirausahaan. Ini yang perlu mendapat perhatian dalam hal program pembinaan UMKM bagi SKPD terkait dibanding aspek teknis, manajerial dan pengembangan usaha.

Hasil wawancara dari yang diungkapkan oleh SKPD adalah (1) tidak adanya basis data tentang pelaku UMKM, (2) rekrutmen UMKM yang tidak tepat sasaran, (3) tumpang tindih program UMKM dan serupa di SKPD, (4) program BULO (badan usaha lorong) sebagai program unggulan yang menyasar UKM lorong kini tidak berjalan menjadi masalah tersendiri.

Hasil rekomendasi yang diberikan ialah : membuat manajemen basis data UMKM, memperkuat kelembagaan BULO, serta kontinuitas program kewirausahaan dan peran inkubator bisnis.

BAB 1. PENDAHULUAN

Latar belakang

Inisiasi UMKM berbasis lorong makassar yang dikhususkan sebagai UMKM lorong wisata menjadi fokus dalam pembangunan ekonomi bagi warga kota. Pemerintah Kota Makassar. Partisipasi masyarakat yang berada di lorong diharapkan mampu memberi dorongan untuk melakukan aktivitas ekonomi yang akan menambah income (pendapatan) warga, menciptakan lapangan kerja dan kepedulian terhadap perbaikan prasarana umum yang ada di lingkungan tersebut.

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) disadari memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangan signifikan khususnya dalam pembentukan produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja. UKM juga dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian. Usaha kecil menengah masih menjadi dominasi penggerak perekonomian rakyat, karena sebagian besar penggerak perekonomian adalah skala kecil maka hal ini menjadi perhatian yang harus difokuskan keberadaannya khususnya bagi pemerintah Kota Makassar.

Definisi usaha mikro kecil menengah sering digunakan dalam literatur *entrepreneur* tetapi pengertian usaha kecil menengah dapat berarti berbeda-beda di tiap negara, tidak ada acuan mana yang harus disepakati tentang definisi dari usaha kecil menengah itu sendiri, hal tersebut dicatat dalam jurnal. UMKM tidak dapat dikatakan sebagai perusahaan besar dikarenakan definisi usaha kecil diatur dalam undang-undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah pada pasal 06 tentang kriteria usaha kecil.

Tabel 1 : Kriteria Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

| Jenis | Kriteria |
|-------|--|
| Mikro | 1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha |
| | 2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) |

| | |
|----------|--|
| Kecil | 1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha |
| | 2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan yang paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) |
| Menengah | 1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha |
| | 2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan yang paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) |

Sumber : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008

Selain dilihat dalam kriteria, untuk usaha kecil juga dibedakan berdasarkan karakteristik, terdapat beberapa karakteristik yang menjadi pembeda setiap usaha kecil. Tambunan, 2002 membagi karakteristik usaha untuk kategori mikro, kecil dan menengah dalam perspektif Negara berkembang dengan memperhatikan aspek hukum, organisasi dan manajemen, keanggotan, proses produksi, market orientasi, profil pemilik, sumber produksi modal, sumber produksi dan modal, dan hubungan eksternal. Selanjutnya dapat diringkas dalam tabel berikut.

Tabel 2

Karakteristik Mikro, Kecil dan Menengah dalam Negara Berkembang

| Aspect | Mikro | Kecil | Menengah |
|----------------------------|--|--|---|
| Hukum | Kebanyakan tidak memiliki izin hukum | Hanya ada beberapa yang memiliki izin hukum | Kebanyakan sudah memiliki izin hukum |
| management & organisasi | Dikendalikan dan dijalankan oleh pemilik, tidak ada hirarki struktur | Dikendalikan dan dijalankan oleh pemilik, tidak ada hirarki struktur | Dikendalikan oleh professional management dan memiliki struktur hirarki |
| keanggotaan | Kebanyakan dimiliki oleh keluarga | Ada beberapa yang di rekrut dari luar keluarga | Semua tenaga kerja di rekrut berdasarkan kriteria professional tertentu berdasarkan rekrutmen profesional |
| Proses produksi | Rendah produksi, dan rendah dalam penggunaan teknologi | Beberapa usaha menggunakan mesin canggih | Kebanyakan memiliki nilai produksi tinggi dan menggunakan teknologi canggih |
| Tujuan pasar | berpendapatan rendah | Pendapat tinggi | Menengah – berpendapat tinggi |
| Profil pemilik usaha kecil | Membuka usaha untuk alasan bertahan hidup | berpendidikan tinggi, dan membuka usaha untuk profit | Berpendidikan tinggi, membuka usaha untuk mencari kekayaan |

| | | | |
|---------------------------|--|--|--|
| Sumber produksi dan modal | Kebanyakan menggunakan material lokal dan pembiayaan sendiri | Beberapa memiliki material dari impor dan pembiayaan dari luar. Beberapa bekerja sama dengan institusi perbankan | Kebanyakan material yang digunakan impor dan bekerja sama dengan institusi perbankan |
| Hubungan eksternal | Kebanyakan sedikit akses ke pemerintah dan tidak memiliki hubungan kerjasama dengan perusahaan besar | Beberapa memiliki akses ke perusahaan besar dan pemerintah | Kebanyakan memiliki akses ke perusahaan besar baik nasional maupun internasional dan menjaga hubungan baik dengan pemerintah |

Sumber : Tambunan (2002)

Berbagai studi tentang permasalahan yang dihadapi UMKM telah dilakukan, Dalam kajian ini akan menjelaskan terdapat permasalahan internal dan eksternal yang dihadapi.

Dalam aspek internal :

1. Aspek Keuangan : Minimnya akses permodalan bagi pelaku UKM merupakan faktor utama yang dihadapi. Kesulitan akses modal bank menjadi masalah utama bagi pelaku UKM
2. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini meliputi rendahnya keterampilan manajemen usaha, profesionalisme, teknik produksi, inovasi, kemampuan berkomunikasi dan kemampuan manajemen keuangan. Rendahnya tingkat pendidikan merupakan faktor penyumbang bagi kualitas SDM.
3. Aspek jaringan usaha dan akses pasar. Umumnya pelaku UKM hanya mampu menjual produk sekitar lingkungan dan kota mereka. Walaupun saat ini telah berkembang internet dan hadirnya keberadaan Marketplace dan media sosial tetap saja mereka masih mengalami kendala dalam hal pemasaran.
4. Aspek teknik produksi dan operasi: kendala utama dihadapi oleh pelaku UKM adalah ketersediaan bahan baku. Kemampuan produksi secara optimal masih kurang, selain itu

teknologi proses produksi yang belum modern dan cenderung masih manual sehingga mempengaruhi kualitas produk yang ada. Ketersediaan kemasan yang baik masih tergantung di pulau Jawa yang menyebabkan naiknya biaya produksi.

Dalam aspek eksternal

1. Kebijakan Pemerintah dan pemerintah lokal: Berbagai instrumen dan regulasi yang mendukung pengembangan UMKM baik secara nasional dan kabupaten. Adanya kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM akan berdampak pada pendapatan asli daerah. Bantuan modal usaha kepada wirausaha baru, kemudahan dalam perizinan, intensif pajak yang rendah, intensitas pelaksanaan pelatihan dan konsultasi kepada pelaku UMKM akan berdampak pada kinerja dan kemajuan usaha mereka
2. Aspek sosial, budaya dan ekonomi. Ketiga aspek ini menjadi hal penting dalam sebuah ekosistem UMKM. Adanya tingkat pendapatan masyarakat yang tinggi tentu akan mendorong juga pendapatan dari pelaku UMKM, Budaya masyarakat yang mendorong terhadap semangat kewirausahaan, dimana mereka bisa saling berkolaborasi dalam mencari peluang-peluang bisnis. Aspek sosial berupa modal sosial seperti nilai atau norma yang terbentuk dalam lingkungan sosial seperti kepercayaan, persekutuan bersama sesama pelaku UKM menjadi faktor penguat bagi keberlangsungan usaha mereka.
3. Keterkaitan dengan lembaga lainnya. Selain pemerintah adanya lembaga lain yang memiliki keterkaitan tidak langsung dengan kegiatan UMKM seperti BUMN(D) melalui program CSR (Corporate Social Responsibility), dan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melalui program-program peningkatan kapasitas masyarakat serta Asosiasi-asosiasi UMKM dan Bisnis yang ada, dimana kehadiran mereka memberi support atau mendukung terhadap aktivitas usaha pelaku UMKM. Mereka hadir dalam bentuk dukungan permodalan, pendampingan usaha, dan jejaring usaha.

Keberpihakan pemerintah Kota Makassar kepada pelaku UMKM sangatlah penting mengingat peran penting yang diberikan sektor ini dalam peningkatan ekonomi daerah. Setidaknya ada tiga yaitu: 1) UMKM bertujuan untuk menyerap tenaga kerja, 2) pemerataan pendapatan dan 3) pengentasan kemiskinan.

Kajian ini memotret aspek-aspek tersebut terhadap problematika pelaku UMKM di kota Makassar dalam kerangka kebijakan pemerintah terhadap pengembangan tersebut. Hal ini sejalan dengan VISI dan Misi Walikota Makassar periode 2021-2024 yakni Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Fatmawati Rusdi. Kajian ini juga akan memetakan hal-hal apa saja yang telah dilakukan oleh Pemkot Makassar terhadap kebijakan pengembangan UMKM. Tidak hanya lingkup Dinas Koperasi dan UKM tetapi dinas lainnya seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas perdagangan serta Dinas Pemuda dan Olahraga yang dinilai banyak melakukan program kepada UKM dan Kewirausahaan.

Salah satu strategi pengembangan UMKM di kota Makassar adalah klasterisasi usaha berbasis lorong yang bertujuan meningkatkan kinerja usaha pelaku UMKM Kota Makassar. Sebagaimana visi dan misi Walikota Makassar akan menciptakan 5000 lorong wisata tentu harus didukung oleh kajian yang komprehensif untuk seperti apa dan bagaimana pengembangan UMKM berbasis lorong tersebut di kota Makassar.

Kajian ini akan memberikan gambaran umum terkait bagaimana potret permasalahan pelaku UMKM saat ini di kota Makassar, analisis kebijakan pengembangan UKM kota Makassar dan model pengembangan UMKM berbasis lorong yang akan diimplementasikan ke depan oleh Walikota Makassar sebagai bagian program kampanye di periode kedua ini.

Adanya program pemkot berupa pengembangan UMKM berbasis lorong, dimana akan dikembangkan 5000 lorong wisata perlu mendapat kajian khusus agar program itu tepat sasaran dan memiliki multiplier efek terhadap perkembangan ekonomi di kota Makassar, menyerap lapangan pekerjaan, mengatasi masalah kemiskinan. Kajian ini memberikan masukan kepada pemkot tentang seperti apa kondisi eksisting pelaku UMKM kota Makassar, seperti apa sinkronisasi program SKPD yang berkaitan dengan pengembangan UMKM berbasis Lorong, dan rekomendasi rencana aksi bagi Pemkot untuk mewujudkan program pengembangan UMKM Berbasis Lorong ini.

Pernyataan Masalah

- Bagaimana profil sebaran usaha UMKM kota Makassar
- Bagaimana permasalahan faktor eksternal dan internal pelaku UMKM Kota Makassar
- Bagaimana permasalahan pengembangan UMKM dilingkup pemerintah kota Makassar
- Rekomendasi apa yang harus dilakukan pemerintah kota Makassar dalam gm hal pengembangan UMKM lorong.

Tujuan penelitian

Pada penelitian kali ini tujuan yang hendak dicapai adalah

1. Menganalisa permasalahan generik terhadap program pengembangan UMKM kota Makassar dengan melakukan identifikasi faktor-faktor penting terhadap lingkungan tersebut.
2. Mengembangkan konsep pengembangan UKM berbasis lorong sebagai strategi pengembangan UKM di Kota Makassar

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan Walikota Makassar dan SKPD dalam hal:

1. Sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dalam melakukan perbaikan penyusunan kebijakan pengembangan UMKM kota Makassar.
2. Sebagai bahan pemerintah Kota untuk menetapkan kebijakan UMKM di wilayah perkotaan dengan mempertimbangkan aspek keberadaan UMKM dan potensi usaha yang efisien.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Entrepreneurship

Dalam pengembangan UMKM berbasis lorong di Kota Makassar, sangat ditekankan bahwa para pelaku ekonomi harus memiliki pola pikir entrepreneur sebagai landasan dalam mengembangkan usaha berbasis lorong. Kajian ini akan memberi penekanan bagaimana konsep kewirausahaan yang harus ditekankan dalam setiap implementasi kebijakan pengembangan ekonomi berbasis lorong bagi pemerintah..

Ekonomi dan Manajemen telah berkembang menjadi ilmu Entrepreneurship/. Kesadaran dalam menumbuhkan dan berkembangnya kewirausahaan sejalan dengan berkembangnya dimensi dari ilmu entrepreneurship itu sendiri, kajian entrepreneurship telah berkembang ke tahap motivasi, perencanaan, dan pembentukan (Deslatte, 2020).

Beberapa ahli memberikan pengertian tentang kewirausahaan, di antaranya Schumpeter dalam (Iqbal, n.d.2015) menjelaskan kewirausahaan sebagai menjalankan kombinasi (kegiatan) yang baru, lebih lanjut menyebutkan eksplorasi berbagai peluang dan mendapatkan secara bersama-sama faktor-faktor produksi. Berdasarkan pengertian tersebut, menyatakan bahwa kewirausahaan merupakan proses mengidentifikasi, mengembangkan dan membawa visi ke dalam kehidupan, visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah menciptakan usaha baru, yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian.

Beberapa ahli lain mendefinisikan entrepreneurship sebagai: (1)Peter F.Drucker *Entrepreneurship* (kewirausahaan) adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*ability to create the new and different*). (2)Thomas W. Zimmerer, *entrepreneurship* (kewirausahaan) adalah penerapan kreativitas dan keinovasian untuk memecahkan permasalahan dan upaya memanfaatkan peluang – peluang yang dihadapi orang setiap hari. (3)Andrew J. Dubrin , entrepreneurship (kewirausahaan) adalah proses mendirikan dan menjalankan sebuah usaha yang inovatif

Pola Pikir Wirausaha (*Entrepreneurial mindset*)

McGrath & MacMillan (2000) mendefinisikan entrepreneurial Mindset sebagai kerangka berpikir seseorang yang berorientasikan entrepreneur, lebih memilih untuk menjalani ketidakpastian daripada menghindari, melihat segala sesuatu lebih sederhana daripada orang lain yang melihatnya secara kompleks, mau belajar sesuatu yang datang dari pengambilan resiko. Pola pikir

kewirausahaan menunjukkan cara berpikir dan tindakan tentang bisnis dan peluangnya yang menangkap manfaat ketidakpastian (McGrath & MacMillan, 2000). Godhwani (2008) menemukan bahwa pengusaha sukses dapat mengidentifikasi peluang kewirausahaan. Pengusaha yang memiliki pola pikir kewirausahaan akan mengenali peluang yang mungkin timbul atau ada di sekitar organisasi (Lahindah & Manurung, 2015)

Pola pikir (*Mindset*) merupakan sebuah konsep psikologi kognitif yang berfokus pada bagaimana seseorang memahami dunia, beradaptasi, berinteraksi dan berperilaku sesuai dengan lingkungan dan budaya yang baru (Saputri & Himam, 2015). Kognisi kewirausahaan adalah tentang memahami bagaimana pengusaha menggunakan model mental yang disederhanakan untuk mengumpulkan informasi yang sebelumnya tidak terkait, yang membantu mereka mengidentifikasi dan menemukan produk atau layanan baru, dan mengumpulkan sumber daya yang diperlukan untuk memulai dan mengembangkan bisnis (Kuratko, dkk, 2015).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pada tanggal 4 juli 2008 telah ditetapkan undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Menurut pasal 1 UU RI No. 20 Tahun 2008, yang dimaksud dengan UKM adalah :

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh seorang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 4) Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang

meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

- 5) Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- 6) Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha mikro, kecil dan menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
- 7) Kemitraan adalah kerjasama dengan keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.

Badan Usaha Lorong (BULo)

Menurut Pomanto (Walikota Makassar, 2016), program BULo diperuntukkan bagi lorong-lorong yang telah menjalankan program Longgar (*Lorong Garden*). Tujuannya adalah setelah menghijaukan lima ribu lorong di Makassar, Pemkot Makassar mengembangkan lorong-lorong Makassar menjadi lorong produktif melalui BULo (Badan Usaha Lorong).

Program Badan Usaha Lorong (BULo) ini dapat mengatasi inflasi dan menghidupkan perekonomian rakyat di lorong makassar. Tanaman hortikultura seperti cabai, tomat, manga, buah naga dll menjadi varietas andalannya. Tanaman yang dihasilkan dibeli oleh pemerintah kota melalui Bulo, hasil penjualannya dikembalikan ke masyarakat untuk ditabung sebagai dana pendidikan anak-anak lorong, dan sebagai modal untuk mengembangkan Bulo yang berada di setiap Kecamatan. Semua penduduk di lorong-lorong diberdayakan guna mendapatkan penghasilan tambahan.

Menurut Dinas Ketahanan Pangan, Pemkot Makassar (2019), Badan Usaha Lorong (BULo) merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kota Makassar yang memiliki dampak positif di sejumlah aspek. Di antaranya, lingkungan, ketersediaan pangan keluarga, dan ekonomi kerakyatan. Sama halnya yang dikemukakan oleh Iriani yang diwartakan oleh Hasanuddin (2019), bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), koperasi bahkan Badan Usaha Lorong (BULo), bisa terus meningkatkan ekonomi kerakyatan.

Pemkot Makassar menegaskan bahwa program yang berhasil mengendalikan inflasi daerah ini akan tetap dilanjutkan meski tahun anggaran RPJMD 2014-2019 berakhir. Bahkan program yang dirintis oleh Dinas Ketahanan Pangan (DKP) ini bakal terus ditingkatkan dan disempurnakan. Program ini yang sangat bagus dan dampaknya luar biasa bagi masyarakat dan juga berhasil mengantarkan Makassar menerima TPID Awards. Pemerintah Kota Makassar akan mengemas program yang diawali dengan pembudidayaan tanaman pangan keluarga di lorong lorong ini dengan penamaan atau branding yang baru pul (Makassar Metro, 2019).

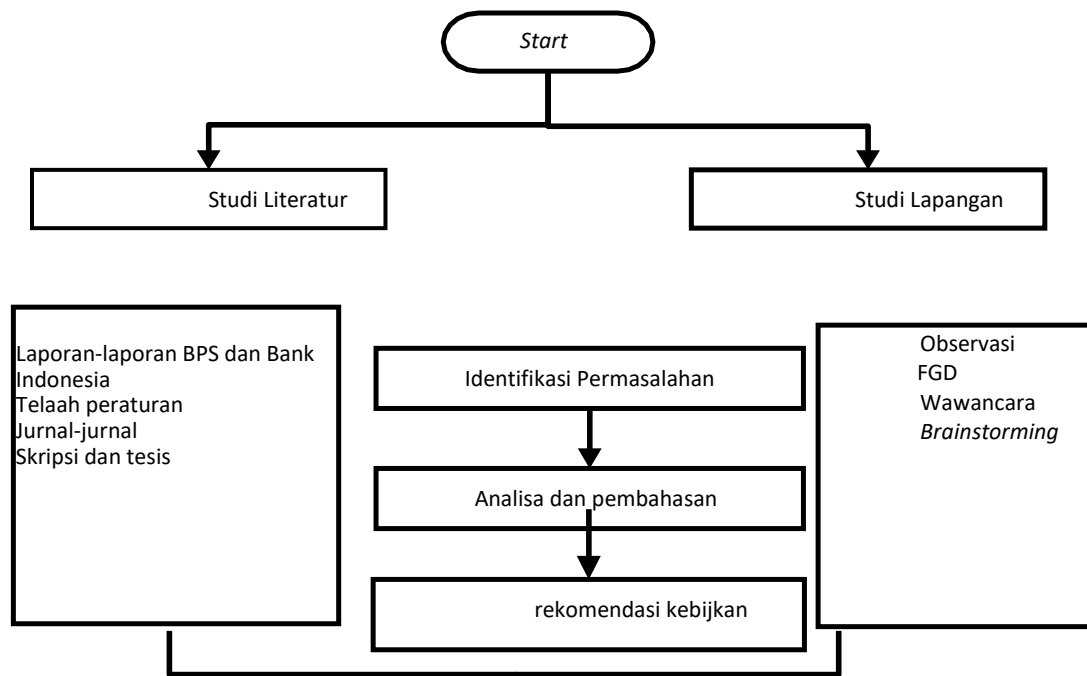
Amanah Undang-Undang Ketahanan Pangan sudah mengatur hal demikian, selain BULO ada juga Kelompok Rumah Pangan Lestari yang dikelola juga oleh warga. Meski brandnya beda tujuannya sama yakni melaksanakan amanah undang-undang untuk masyarakat.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian.

Penelitian kali ini menggunakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menjawab masalah penelitian. Penelitian ini akan meliputi penilaian sikap atau pendapatan terhadap keberadaan objek penelitian dalam hal ini perusda Pemkot Makassar. Kajian ini akan digunakan untuk pengambilan keputusan bagi Pemerintah Kota Makassar, mengenali permasalahan yang ada dan memberikan model klasterisasi wilayah sebagai model pengembangan UKM di Kota Makassar.

Berikut ini merupakan *flowchart* pada pelaksanaan penelitian yang dilakukan



Gambar 3.1 *Flowchart* Metodologi Penelitian

Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data penelitian kali ini dapat dibagi kedalam dua jenis data yaitu data yang bersifat kuantitatif dan kualitatif yang bersumber pada data primer dan data sekunder. Implementasi teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode

1. Wawancara : Melakukan wawancara mendalam terhadap SKPD yang terkait dengan program UKM seperti Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Dinas Perdagangan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dan Bappeda.
 - a. Wawancara dilakukan kepada pelaku UMKM Kota Makassar dari bulan Mei dan Agustus 2022. Mereka adalah pelaku UMKM yang terdaftar di dinas Koperasi dan UKM. Adapun Pelaku UMKM yang diwawancarai adalah
 - i. Ibu Catur Pemilki usaha Bumbu Pecel Intan, BTN Angkasa Pura Blok A2 No. 11 Makassar
 - ii. Ibu Samirah Adnan, pemilik Usaha SO Suhrah, Catery dan bakery Jl. Pajjaiang no 23 Paccerakkang, Biringkanaya
 - iii. Abd Wahab, Pemilik Usaha Golatha, bergerak dibidang pengolahan hasil laut dan pertanian, salah satu produk adalah gula aren dalam kemasan premium beralamat Jl. Kelapa 3 No. 16 Ballaparang Rappocini
 - iv. Ibu Wahida, Pemilik Warung Gerobak Bunda, menjual makanan rumahan yang diujakan di beberapa lorong, beralamat Komp. Manggal Permai A/1
 - b. Wawancara dilakukan ibu Kepala Dinas Koperasi dan UKM di ruang kerja Jl Balaikota Makassar pada tanggal 13 Juni 2022, dilanjutkan kegiatan FGD pelaksanaan inkubator Centre, dan tanggal 16 Juni 2022. Selain itu wawancara dengan Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan DR Ferdi Mochtar, Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
 - c. Wawancara juga dilakukan dinas kearsipan untuk mendapatkan dokumen lain serta peta wilayah kota Makassar.
 - d. Wawancara dilakukan dengan pihak lainnya seperti staf OJK Regional 6 bagian edukasi, Ibu Fanny, dan Staf Bank Indonesia Bapak Resa yang banyak terkait dengan program pengembangan UMKM khususnya di kota Makassar

2. Observasi : Melakukan observasi di lapangan untuk mengetahui kondisi terkini pelaku UKM Kota Makassar dan kebijakan pemkot makassar terhadap keberadaan UMKM.
 - a. observasi dilakukan dengan berkunjung di kegiatan pelatihan UMKM kota Makassar periode bulan mei sampai juni
 - b. Berkunjung ke sentra UKM di daerah borong raya, dan inkubator bisnis unhas sebagai tempat beberapa pelaku UKM dibina.
 - c. Melakukan observasi ke 15 UKM Lorong wisata yang dijadikan proyek awal dalam inisiasi lorong wisata. UKM itu adalah :
 - i. Klaster Lorong Wisata Kuliner Urban Farming Jl falboyan, Kec, Mariso
 - ii. Klaster Lorong Wisata Budaya Jl Paropo, Kec Panakukang
 - iii. Klaster Lorong Wisata Malimongan. Jl Satando, Kec Wajo
 - iv. Klaster Lorong Wisata Pengrajin Perak dan Tembaga
 - v. Klaster Lorong Santri, Darul Arqam, Jl Pai Kec Biringkanaya
 - vi. Klaster Lorong Songkolo Bagadang, Jl Antang Raya Kec Manggala
 - vii. Klaster Lorong Milenial Jl Pintu Nol Unhas Kec Tamalanrea
 - viii. Klaster Lorong Sanitasi Percontohan Internasional (RISE)
 - ix. Klaster Lorong Wisata Pentas Seni Tepi Kanal jl Nuri Baru Kec Bontomarannu
 - x. Klasterisasi Lorong Wisata dan kuliner Walanai Jl S.Walanae Kec Makassar
 - xi. Klasterisasi Lorong wisata dan kuliner batu putih JL G Batu Putih. Kec Ujung Pandang
 - xii. Klasterisasi Lorong Wisata Food Street Bazar Jl S Pareman Kec Ujung Pandang Baru
 - xiii. Klasterisasi Lorong wisata perumnas antang
 - xiv. Klasterisasi Lorong wisata Toa daeng Jl Toa daeng IV Kec. Panakkukang.
3. Focus Group Discussion : Mengundang 15-10 orang yang mewakili stakeholder dari pemangku kepentingan masing-masing untuk menggali permasalahan yang dihadapi. FGD yang dilakukan dengan mengundang pelaku UMKM kota Makassar yang dilaksanakan di Inkubator Bisnis Universitas Hasanuddin pada tanggal 1 agustus 2022
4. Studi pustaka dan literatur studi : melakukan searching literatur terhadap klasterisasi wilayah dan pengembangan UKM Kota Makassar. Studi dilakukan dengan menggunakan telaah BPS (Biro Pusat Statistik Makassar), serta Laporan Bank

Indonesia. Akses beberapa jurnal penelitian melalui googleschoolar dan digilib.unhas.ac.id

.

Outcome penelitian

1. Luaran penelitian ini akan memberikan pedoman dalam membuat rekomendasi operasional bagi Pemerintah Kota Makassar dalam mengembangkan UMKM berbasis lorong Kota Makassar
2. Rekomendasi ini yang berorientasi keputusan jangka pendek dan menengah bagi pemerintah kota Makassar yang berdasarkan dengan program strategis Bapak Walikota Ir Ramdhan Pomanto di periode kedua masa jabatannya.

BAB IV. PEMBAHASAN

Program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam upaya mengembangkan sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) selama ini sungguh menggembirakan. Peningkatan peran dan kegiatan usaha sektor ini semakin nampak khususnya sejak era krisis ekonomi dan keuangan pada tahun 1997. Di Tengah tengah proses restrukturisasi sektor korporat dan BUMN yang berlangsung lambat, sektor ini telah menunjukkan perkembangan yang terus meningkat dan bahkan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Kondisi dan fakta tersebut sejalan dengan hasil penelitian empiris yang dilakukan Demirbag *et al.*, (2006) yang menyimpulkan bahwa keberhasilan usaha kecil dan menengah (*small-medium enterprises*) memiliki dampak langsung terhadap pembangunan ekonomi baik pada negara maju maupun negara berkembang. Usaha kecil dan menengah memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja dengan biaya minimum, mereka adalah pelopor dalam dunia inovasi dan memiliki fleksibilitas tinggi yang memungkinkan usaha tersebut untuk memenuhi kebutuhan pelanggan (Brock dan Evans, 1986; ACS dan Audretsch, 1990).

Beberapa penelitian dan studi sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan acuan atau rujukan untuk dikembangkan dalam penelitian ini antara lain lah : (1) McCommick *et.al* (1997) melakukan penelitian di Nairobi dengan menguji variabel modal awal, permintaan, umur, tingkat pendidikan, etnik, tersedianya kredit, dan bauran produk. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Modal awal, tersedianya kredit, bauran produk dan permintaan serta umur, tingkat pendidikan, etnik dari wirausaha berhubungan dengan pertumbuhan perusahaan (dalam pertumbuhan tenaga kerja); (2) Crijns dan Ooghi (2000) mengungkapkan bahwa setiap tahap pertumbuhan perusahaan merupakan hasil dari dua lingkungan dimana perusahaan melakukan bisnisnya, yakni lingkungan internal dan eksternal. Faktor eksternal penting yang mempengaruhi pertumbuhan perusahaan adalah: industri dan pasar, perusahaan pesaing, dan iklim ekonomi. Sedangkan faktor internal yang sangat penting (*critical development factors*) untuk pertumbuhan perusahaan adalah: pengusaha kecil sebagai manajer, perusahaan sebagai organisasi, kepemilikan atau struktur kepemilikan.

Penelitian Wisardja (2000) menunjukkan bahwa faktor lingkungan industri yang unsur-unsurnya adalah pelanggan, pemasok, pesaing dan teknologi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan usaha industri ukiran kayu di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali; dan unsur pelanggan berpengaruh paling dominan terhadap keberhasilan usaha kayu

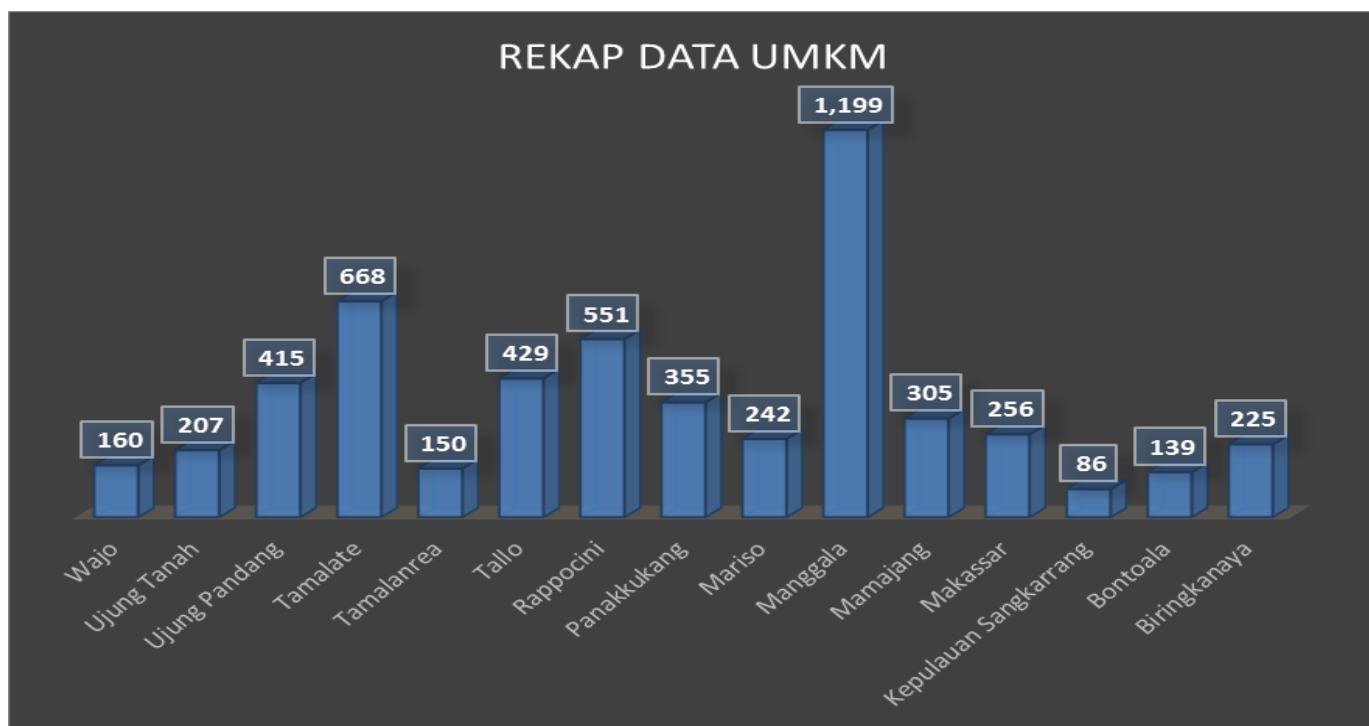
tersebut. Zhang (2001) menyimpulkan bahwa dua prekondisi utama untuk tumbuhnya usaha kecil, yakni kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidup jangka panjang, dan kemampuan manajer untuk mengatasi hambatan manajemen.

Berkaitan dengan aspek lingkungan, Wilkinson (2002) menyatakan bahwa usaha kecil dan mikro akan tumbuh bilamana lingkungan aturan/kebijakan mendukung, lingkungan makro ekonomi dikelola dengan baik, stabil, dan dapat diprediksi; informasi yang dapat dipercaya dan mudah diakses, dan lingkungan sosial mendorong dan menghargai keberhasilan usaha tersebut.

Studi yang dilakukan oleh Maupa (2004) menunjukkan: (1) Karakteristik individu manajer/ pemilik, karakteristik perusahaan, lingkungan eksternal bisnis, dan dampak kebijakan ekonomi dan sosial mempunyai pengaruh langsung, positif, dan signifikan terhadap strategi bisnis dan pertumbuhan usaha; (2) Karakteristik perusahaan, dan dampak kebijakan sosial dan ekonomi mempunyai pengaruh langsung yang negatif terhadap strategi bisnis; dan (3) Strategi bisnis mempunyai pengaruh langsung, positif, dan signifikan terhadap pertumbuhan perusahaan.

Persebaran Lokasi Usaha Kecil Dan Menengah Kota Makassar 2021

Berdasarkan data dari dinas koperasi dan UMKM Kota Makassar terdapat 5.387 pelaku UKM kota Makassar. Mereka tersebar di 15 kecamatan yaitu : pada kecamatan Manggala menjadi lokasi terbanyak berdirinya UKM yaitu sebanyak 1.199 buah sedangkan kecamatan yang tersedikit sebanyak 86 buah ialah kecamatan kepulauan sangkarrang. Adapun selain kedua kecamatan tersebut berikut banyaknya usaha kecil dan menengah yang tersebar di 13 kecamatan lainnya , yaitu kecamatan Tamalate sebanyak 668, kecamatan Rappocini sebanyak 551 buah, kecamatan Tallo sebanyak 429 buah, kecamatan Ujung Pandang sebanyak 415 buah, kecamatan panakukang sebanyak 355 buah, kecamatan mamajang sebanyak 305 buah, kecamatan Makassar sebanyak 256 buah, kecamatan Mariso 242 buah, kecamatan Biringkanaya sebanyak 225 buah, kecamatan Ujung tanah sebanyak 207 buah, kecamatan Wajo sebanyak 160 buah, kecamatan Tamalanrea sebanyak 150 buah.

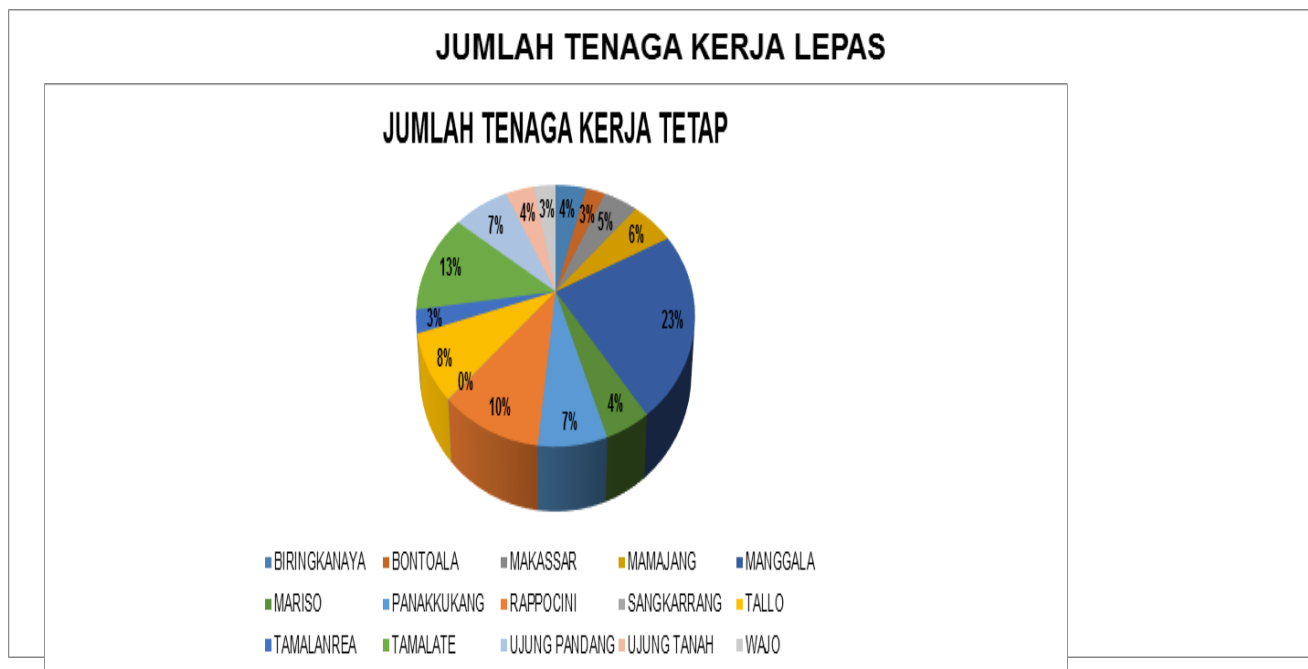


Sumber: Dinas Koperasi dan UKM , Bidang UKM Kota Makassar 2022

Jumlah tenaga kerja tetap

Berapa besar serapan jumlah tenaga kerja di Kota Makassar terkait aktivitas ekonomi dari pelaku UMKM dapat kita temukan di tahun 2021 jumlah tenaga kerja tetap yang bekerja di usaha kecil dan menengah di kota Makassar berbeda beda. Pada diagram menggambarkan Kecamatan Manggala mempunyai tenaga kerja tetap terbanyak yaitu 23 %, sedangkan yang terkecil adalah kecamatan kepulauan Sangkarrang memiliki tenaga kerja tetap yaitu 1 %. Adapun tenaga kerja tetap pada kecamatan kecamatan lain adalah diurutkan sebagai berikut : Kecamatan Tamalate sebanyak 13 %, Kecamatan Rappocini sebanyak 10%, Kecamatan Tallo sebanyak 8 %, Kecamatan Ujung Pandang & Kecamatan Panakukang sebanyak 7 %, Kecamatan Mamajang sebanyak 5 %, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mariso, Kecamatan Ujung Tanah sebanyak 4 %. Adapun kecamatan bontoala, wajo dan Tamalanrea sebanyak 3 % dari total jumlah tenaga kerja keseluruhan.

Jumlah tenaga kerja lepas



Terlihat di tahun 2021 jumlah tenaga kerja tetap yang bekerja di usaha kecil dan menengah di kota Makassar berbeda beda. Terlihat pada diagram menggambarkan Kecamatan Rappocini mempunyai tenaga kerja lepas terbanyak yaitu 27 %, sedangkan yang terkecil kecamatan kepulauan Sangkarrang memiliki tenaga kerja tetap yaitu 1 %. Adapun tenaga kerja lepas pada kecamatan kecamatan lain adalah diurutkan sebagai berikut : Kecamatan Ujung Pandang yaitu sebanyak 16 %, Kecamatan Panakukang yaitu sebanyak 9 %. Kemudian 3 kecamatan yang sama sama memiliki 6 % tenaga kerja lepas yaitu : Kecamatan Manggala, Mariso, dan Kecamatan Tamalate, sedangkan Kecamatan Tallo, Bontoala, Mamajang memiliki 5 % tenaga kerja lepas. Lalu Kecamatan Makassar, Tamalanrea dan Wajo hanya memiliki 4 % tenaga kerja lepasnya. Berikutnya Kecamatan Ujung tanah memiliki 2 % dan yang terkecil adalah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang ialah hanya 1 % tenaga kerja lepasnya

Analisa Faktor Eskternal Dan Internal Pelaku Umkm Kota Makassar

Kajian terhadap analisis faktor eksternal dan internal pelaku UMKM ditemukan berbagai macam permasalahan yang dapat dibagi secara lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Khusus pada kondisi internal ditemukan berbagai masalah yang dihadapi seperti tingkat pendidikan , kepemimpinan serta pengalaman dan pengetahuan bisnis pelaku UMKM. Selain itu permasalahan di bidang pemasaran, pengelolaan keuangan serta akses pasar dan distribusi menjadi faktor yang dominan dihadapi oleh pelaku UMKM kota Makassar.

| No | Identifikasi Masalah | | Penjelasan |
|----|----------------------|--|---|
| 1 | Masalah internal | 1. Sumber Daya Manusia 2. Keuangan 3. Teknis 4. Pasar & Pemasaran | <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pendidikan formal • Perilaku kewirausahaan • Pengalaman / lama berusaha • Motivasi dan keterampilan <ul style="list-style-type: none"> • Modal Sendiri • Modal pinjaman • Tingkat keuntungan dan akumulasi modal • Membedakan pengeluaran pribadi/ keluarga <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya bahan baku • Kapasitas produksi • Tersedia mesin <ul style="list-style-type: none"> • Teknologi modern dan pengendalian kualitas • Permintaan Pasar • Penetapan harga bersaing • Kegiatan promosi • Saluran distribusi dan wilayah pemasaran • Potensi permintaan suatu daerah • Akses saluran distribusi produk |

| | | | |
|---|-------------------|---|---|
| 2 | Masalah eksternal | 1. Kebijakan Pemerintah 2. Peranan Lembaga Terkait 3. Makro ekonomi | <ul style="list-style-type: none"> • Permodalan dan pembiayaan • Pembinaan Melalui SKPD • Peraturan & aturan pro bisnis • Penyiapan lokasi usaha dan penyediaan informasi • Bantuan modal dari lembaga terkait • Pelatihan Pendampingan • Monitoring dan evaluasi • Suku bunga, • kebijakan uang beredar • daya beli umum masyarakat • Pemasok atau supplier • Pelanggan • Pesaing |
|---|-------------------|---|---|

Sementara faktor eksternal yang mereka hadapi adalah dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan publik yang memberi ruang yang sehat untuk bertumbuh, keterlibatan lembaga terkait seperti BUMN, Asosiasi, Universitas serta LSM untuk bersama-sama mendukung program pengembangan UMKM, kondisi makro ekonomi serta kehadiran industri terkait yang menjadi basis supplier terhadap produk-produk UKM.

Permasalahan itu dapat diringkas dalam tabel berikut ini:

Strategi Pengembangan UMKM Pemkot Makassar

Dalam mendukung pengembangan UMKM di wilayah kota Makassar, diterbitkan perwali nomor 120 Tahun 2021 tentang fasilitasi kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan Usaha mikro. Perwali ini menjadi pedoman untuk melakukan pengembangan terkait hal koperasi, UMKM dalam bentuk pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan penguatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing koperasi dan UMKM. Perwali ini mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026 dimana salah satu misi tersebut tertuang dalam program peningkatan imunitas ekonomi yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas dan kesejahteraan koperasi dan UMKM.

Perwali ini disusun dengan mengacu dari regulasi sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah. Perwali ini diharapkan sebagai bentuk komitmen keberpihakan pemerintah Kota Makassar pada pelaku ekonomi golongan kecil dan diharapkan mampu memberikan terobosan dalam pemberdayaan kepada koperasi dan UKM dalam mendukung pengembangan usaha mereka.

Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

Berbagai bentuk program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar yaitu: (1) Program Tahun 2018, 2) Bimbingan teknis desain keterampilan kerajinan border; 3) Pemanfaatan informasi teknologi dalam peningkatan kualitas UKM; 4) Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama UKM; 5), Promosi produk unggulan UMKM. 6) Bimtek pola pengelolaan limbah rumah tangga untuk UMKM; 7) Bimtek teknik pengelolaan warung makan; 8) Fasilitasi pemasaran produk UMKM dengan pelaku bisnis; 9) Pengembangan pemberdayaan UMKM bagi pelaku usaha jasa Laundry; 10) Pemanfaatan informasi teknologi dalam peningkatan kualitas UMKM; 11) Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama UMKM; 12) Lomba lorong UKM; 813 Sentra Galeri produk unggulan koperasi dan UKM; 14) Penyelenggaraan promosi produk unggulan; 15) Workshop peningkatan pengelolaan keuangan UMKM.

Pendataan pelaku UMKM merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh dinas koperasi dan UKM. Adanya data base pelaku UKM yang akurat, membuat profile usaha, klasifikasi usaha, dan beberpa data yang dibutuhkan untuk keputusan dalam hal pengembangan program masih diupayakan oleh dinas ini.

Ditahun ini Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar juga telah mengembangkan aplikasi SIDATU MICIKO (Aplikasi sistem informasi data terpadu usaha mikro dan koperasi) berupa sistem basis data terhadap pelaku UMKM di wilayah kota Makassar yang akan memberi informasi terkait nama, lokasi usaha, jenis usaha, besaran usaha dan legalitas usaha yang dimiliki. Aplikasi sistem informasi data terpadu usaha mikro dan koperasi bekerjasama dengan RT/RW terhadap keberadaan data pelaku UKM di wilayah lorong.

Dinas Ketahanan Pangan

Pada periode pertama masa kepemimpinan Ir Mohammad Ramdhan Pomanto membuat program BULO yang dikenal dengan badan Usaha Lorong. Program ini di inisiasi oleh Dinas Ketahan Pangan sebagai leading sektor dengan membentuk Kelompok kerja. Badan Usaha Lorong (BULO) merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kota Makassar yang memiliki dampak positif di sejumlah aspek. Di antaranya, lingkungan, ketersediaan pangan keluarga, dan ekonomi kerakyatan.

Pemkot Makassar menegaskan bahwa program yang berhasil mengendalikan inflasi daerah ini akan tetap dilanjutkan meski tahun anggaran RPJMD 2014-2019 berakhir. Bahkan program yang dirintis oleh Dinas Ketahanan Pangan (DKP) ini bakal terus ditingkatkan dan disempurnakan. Program ini yang

sangat bagus dan dampaknya luar biasa bagi masyarakat dan juga berhasil mengantar Makassar menerima TPID Awards. Pemerintah Kota Makassar akan mengemas program yang diawali dengan pembudidayaan tanaman pangan keluarga di lorong lorong ini dengan penamaan atau branding yang baru pula.

Namun diakui program ini berhenti manakala terjadi kekosongan pemerintahan kota Makassar yang dijabat oleh PJ Walikota. Beberapa kelemahan yang dirasakan oleh BULO adalah sikap masyarakat yang apatis dan tidak melanjutkan lagi program ini manakala tidak ada lagi dana stimulus yang diberikan.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dinas Pariwisata berfungsi sebagai berikut: Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Beberapa program yang mereka lakukan banyak menasar pelaku UMKM khususnya di sektor ekonomi kreatif. Kendala utama adalah ditemukan beberapa pelaku UKM yang telah berkali-kali mendapatkan bantuan baik bentuk pelatihan dan dana hibah. Kebutuhan terkait ketersediaan data pelaku UKM yang akurat serta apa saja yang telah mereka dapatkan dari SKP lain menjadi hal mendesak.

Menyangkut program UKM berbasis lorong sendiri dinas ini menyiapkan anggaran khususnya mendukung program UKM lorong wisata sebagaimana tupoksi mereka. Beberapa program antara lain adalah penguatan tur guide untuk spot lorong wisata bekerjasama dengan asosiasi travel.

Inovasi Program pengembangan UMKM berbasis lorong

Pemerintah kota memiliki beberapa program inovasi yang tertuang dalam Perwali Nomor 120 Tahun 2021 dimana sebagai SKPD yang diberi tugas adalah Dinas Koperasi dan UKM Makassar. Ini disebut sebagai fasilitasi inovasi program berbentuk Pagandeng Smart (tettere), Smart Kanrerong (Berlokasi di Karebosi dan Jl Nikel) serta *Smart Inkubator Centre* UMKM.

Pagandeng Smart (tettere) merupakan program pemkot dengan membuat alat transportasi listrik yang mengangkut produk-produk UKM dan barang-barang kebutuhan sehari-hari yang diinisiasi oleh badan usaha berbasis lorong. Komoditas ini berbentuk pangan dan non pangan yang akan menjadi alat distribusi produk-produk UMKM di lorong-lorong.

Smart Kanrerong merupakan penyediaan ruang usaha dalam bentuk lokalisasi dimana mengumpulkan para pedagang kaki lima dengan jenis usaha seperti kuliner, barang campuran, dan jasa lainnya. Smart kanrerong ini berlokasi di Lapangan karebosi di depan rumah sakit bersalin Khadijah dan di jalan nikel. Smart kenrerong ini juga akan didukung oleh aplikasi digital untuk memudahkan pemanfaatan aplikasi dan membantu kelancaran usaha pelaku UMKM.

Smart Incubator Centre adalah suatu program dimana dibangun basis data pelaku UMKM, dimana akan berfungsi sebagai alat analitik dalam hal pengambilan kebijakan dan keputusan untuk membantu pengembangan usaha pelaku UMKM. Selain itu akan dibangun pusat digital marketplace Kota Makassar. Hal lain ini akan menjadi *co working space* atau ruang bersama untuk bekerja dan berusaha bagi pelaku UMKM.

Permasalahan dihadapi Pemkot Makassar.

Hasil wawancara dan kajian literasi yang dilakukan ditemukan permasalahan yang berpengaruh terhadap bagaimana Pemkot dalam merumuskan kebijakan pengembangan UMKM berbasis lorong.

1. **Tidak ada basis data pelaku UMKM.** Ketidaksinkronan data terkait jumlah pelaku UMKM Kota Makassar. Pada Dinas Koperasi dan UKM diakui ada perbedaan data yang pada awalnya 15.000 pelaku UMKM tetapi setelah dilakukan pemeriksaan data pelaku UKM, menemukan beberapa data pelaku UKM yang double maka dihasilkan basis data baru sejumlah 5.387 dengan tingkat kevalidan yang tinggi berdasarkan *by name* dan *by address*.
2. **Rekrutmen pelaku UMKM Binaan tidak efektif.** Permasalahan ketidakadaan basis data yang valid periode sebelumnya ini mengakibatkan ketidakakuratan dalam hal rekrutmen pelaku UKM dalam mendapatkan program fasilitasi dari Dinas seperti pelatihan, pembinaan, promosi usaha serta bantuan usaha kepada pelaku UMKM yang ada. Sehingga diakui bahwa sering kali pelaku UMKM mendapat bantuan yang tidak tepat sasaran, berulang dan tidak memberikan efektifitas terhadap program yang dijalankan.
3. **Program pengembangan UMKM yang serupa di banyak SKPD.** Ditemukan begitu banyak program pengembangan UMKM yang dilaksanakan serupa pada lingkup SKPD. Seperti pada Dinas Pemuda dan Olahraga, berupa program wirausaha muda yang baru, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan yang pola pelatihan pengembangan UMKM hampir serupa. Selain itu peserta yang diundang untuk mengikuti adalah sama di setiap lingkup Dinas. Hal ini disebabkan karena SKPD melakukan rekrutmen peserta dengan memberikan undangan dan permohonan data pada Kecamatan. Kecamatan dalam hal ini juga tidak memiliki pendataan yang baik. Konsep UKM lorong sendiri dikembangkan secara parsial dalam arti masing-masing SKPD memiliki tupoksi yang disesuaikan dengan anggaran dan program dari RJPD dan Arahan Kementerian yang membawahi mereka,
4. **Program BULO yang tidak berjalan lagi.** Kehadiran BULO (Badan Usaha Lorong) yang pada awal periode Walikota Makassar pada tahun 2014-2018 dipandang sebagai suatu inovasi pengembangan pelaku UMKM berbasis lorong, namun inisiasi ini kembali berhenti dan tidak mendapat perhatian. Hal ini sangat disayangkan karena dengan pembentukan BULO sebagai suatu badan atau lembaga yang diinisiasi di lorong akan mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu kehadiran perlu diperbaiki kembali

dan dilakukan pembenahan, haranya BuLO ini menjadi motor penggerak pelaku UMKM berbasis lorong. BULO sendiri harusnya memiliki regulasi yang jelas dan bentuk tata kelola yang jelas agar dapat mandiri dan berkembang tanpa harus didanai oleh APBD dari Pemkot. Konsep BULO harus diperkuat sebelum membuat konsep baru dalam UKM basis lorong yang dinamakan Dewan Lorong.

Bab V. Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Kajian yang dimulai dari melihat secara perspekti analisa eksternal dan internal pelaku UMKM, kemudian dilanjutkan dengan pendalaman terkait program pengembangan UMKM di beberapa SKPD yakni Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Pariwisata. Kemudian analisa permasalahan yang dihadapi oleh SKPD dalam mengembangkan program pengembangan UMKM, maka disusunlah rekomendasi kebijakan yang harus mendesak dilakukan oleh pemerintah kota Makassar. Kajian ini menyederhanakan persoalan terkait efektivitas Program pengembangan UMKM di Kota Makassar berbasis Lorong ini. Apa yang perlu mendesak dilakukan pemerintah Kota Makassar adalah

Pertama; Menciptakan basis data UMKM terintegrasi, melakukan pendataan ulang, memperbaiki basis data, mengumpulkan data usaha yang lebih detail dari pelaku UMKM seluruh kota Makassar berdasarkan wilayah per kecamatan. Perlu instruksi walikota khusus terhadap SKPD yang harus menjadi penanggung jawab untuk melakukan pendataan ini serta memastikan pendataan yang dilakukan valid dan benar disemua kecamatan.

Ketersediaan Pusat data daerah terkait keberadaan pelaku UMKM dapat diprioritaskan dengan pelibatan SKPD dalam hal ini dinas koperasi dan UKM dan Dinas Kominfo serta Dukcapil. Ini dapat terlaksana bila Walikota membentuk Tim khusus atau Pokja untuk mengawal ketersediaan pusat data daerah terkait profil pelaku UMKM. Pusat data ini akan berfungsi untuk memberi gambaran kondisi usaha pelaku UMKM, seperti bidang usaha, laporan keuangan, potensi laba, peningkatan penjualan, legalitas usaha dan rencana pengembangan usaha. Pusat data ini juga memberi informasi terkait jumlah tenaga kerja yang dimiliki, pelatihan dan pendampingan usaha yang telah diikuti, dan aspek lainnya yang berguna bagi pemerintah untuk mengetahui dan melakukan pemetaan potensi usaha di setiap kecamatan.

Basis data ini harus terintegrasi dimana segala aktivitas yang mereka lakukan, program kegiatan pembinaan UMKM yang diperoleh dari dinas lainnya, kementerian, serta bantuan-bantuan pemerintah baik dalam bentuk subsidi atau dana hibah dapat terupdate dalam suatu sistem basis data terintegrasi. Hal ini menghindari adanya ketimpangan antara UKM, dan memungkinkan pemerintah juga senantiasa memonitoring perkembangan usaha UMKM,

sehingga memudahkan dalam proses peramalan dalam bentuk retribusi, pajak UMKM, dan bentuk penerimaan PAD dan indikator ekonomi lainnya.

Ketersediaan pusat data terkait pelaku UMKM dan memperkuat program BULO merupakan langkah awal yang harus dilakukan Pemkot dalam mengimplementasikan program UKM Lorong sebagaimana yang menjadi VISI MISI ADAMA untuk periode 2021-2016. Selain itu program Pemkot seperti UKM Lorong Wisata dapat pula menggunakan data tersebut sebagai langkah untuk memetakan klusterisasi potensi UKM yang ada di lorong-lorong.

Kedua; Pembenahan ulang terhadap program Badan Usaha Lorong (BuLO) yang pernah di inisiasi. BULO hendaknya dihidupkan kembali sebagai organisasi formal dalam hal melakukan fungsi koordinasi, pembinaan dan pendampingan usaha pelaku UKM di Lorong kota Makassar. Keberadaan BuLO perlu diatur dalam suatu regulasi khusus dengan meminta SKPD dalam hal ini yang dinilai tepat adalah Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Penguatan kelembagaan BULO harus disertai dengan kejelasan usaha tersebut diatur dalam badan hukum. Badan hukum yang tepat untuk BULO adalah koperasi. Koperasi dapat dipahami sebagai Badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau Badan Hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Penguatan BULO sendiri secara kelembagaan dibagi kedalam tiga tahapan yaitu

- (1) Tahap persiapan: Pada tahap ini smart inkubator bisnis melakukan identifikasi calon penerima dan calon lokasi berkoordinasi dengan Camat dan Lurah untuk memilih kelompok yang memenuhi kriteria yang berupa aspek teknis, administrasi & lingkungan. Setelahnya diidentifikasi apa saja yang menjadi kebutuhan mereka lalu diusulkan dalam proposal pengusulan kebutuhan kelompok yang kemudian menjadi salah satu pedoman penyaluran bantuan kepada kelompok oleh smart inkubator bisnis. Selanjutnya sosialisasi dan koordinasi persiapan tim dengan teknis pelaksanaan kegiatan beserta tugas masing masing yang didalamnya termasuk persiapan materi yang diberikan dari tenaga ahli, penentuan jadwal dan tempat kegiatan
- (2) Tahap pelaksanaan pengembangan kapasitas usaha: Tahap ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yaitu : tahap pelatihan bisnis dan manajemen UKM berbasis lorong, penyaluran bantuan dan tahapan pelaksanaan pengembangan usaha.
- (3) Tahap pasca pengembangan

Tahap ini dibagi 3 : pendampingan , monitoring dan evaluasi pasca pengembangan.

Ada 2 proses diantaranya :

- Pendampingan oleh penyuluh dari smart inkubator bisnis
- Pendampingan oleh fasilitator Kelurahan dan Kecamatan

Sedangkan untuk tahap monitoring dan evaluasi pasca pengembangan terdapat proses yang dilaksanakan diantaranya pertemuan dilakukan berkala antar pihak terkait dan monitoring serta evaluasi hasil pendampingan yang dilakukan smart inkubator.

Ketiga: program kewirausahaan dan Lembaga Inkubator bisnis . Kontinuitas program kewirausahaan untuk menciptakan wirausaha baru sebagai salah satu solusi untuk terus menerus menumbuhkan *entrepreneur mindset* (Mindset Kewirausahaan) agar pelaku UMKM dapat bertahan ditengah tinggi kondisi persaingan bisnis yang ada. Adanya lembaga seperti Inkubator bisnis sebagai lembaga pendampingan wirausaha perlu dibentuk baik itu dari pihak swasta maupun dari pemerintah. Lembaga ini dimana telah diberi nama sebagai smart inkubator bisnis yang merupakan bagian dari program prioritas Pemkot.

Adanya kelembagaan yang berfungsi untuk pendampingan dan pemberian fasilitas pengembangan usaha dan manajemen UMKM seperti inkubator bisnis telah mendapat regulasi yang cukup kuat dari pemerintah. Regulasi tersebut dalam bentuk Peraturan Presiden no 27 tahun 2013 tentang pengembangan inkubator wirausaha dan Peraturan menteri koperasi dan ukm nomor 24 tahun 2015 tentang NSPK Inkubator wirausaha regulasi ini menjadi payung hukum dan arah yang jelas pengembangan inkubator bisnis di tanah air.

Inkubator adalah sebuah bangunan fisik (gedung) yang diperuntukkan untuk mendukung bisnis berkualifikasi melalui mentoring, pelatihan, jejaring profesi, dan bantuan mencari pendanaan sampai mereka lulus dan dapat bertahan hidup dalam lingkungan yang bersaing.

Pemerintah Kota memberi ruang kepada pihak swasta, asosiasi, perguruan tinggi dan masyarakat umum untuk mendirikan Lembaga inkubator bisnis dan kewirausahaan. Pihak swasta tentu akan menangkap peluang bisnis ini berupa program kewirausahaan yang massif sehingga para pelaku UMKM mendapat pendampingan dan konsultasi bisnis tidak hanya dari pemerintah melalui SKPD nya. Pemerintah dapat memberi dana stimuli kepada pihak yang mengembangkan inkubator bisnis atau dapat memberi subsidi untuk program inkubator bisnis,

melibatkan BUMN(D) dalam dana CSR (Corporate Social Responsibility) sebagai sumber pendanaan.

Keberadaan inkubator bisnis pemerintah kota Makassar harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku UMKM yang membutuhkan pendampingan usaha, mentoring serta coaching bisnis untuk keberlanjutan usaha mereka, Selain itu peran inkubator bisnis menjadi Lembaga penguatan bagi kelompok usaha UMKM klasterisasi wilayah yang berbasis Lorong dalam penguatan kelembagaan BULO. BULO diharapkan menjadi suatu badan usaha formal yang berbasis di Lorong yang terdiri dari pelaku UMKM dan bersinergi dengan perangkat di kecamatan dan kelurahan dengan focus pengembangan pada Lorong.

DAFTAR PUSTAKA

- Iqbal, M. (N.D.). Business Exit Contemplation : A Study Of Sme Owners In Indonesia
A Thesis Submitted In Fulfilment Of The Requirement For The Degree Of Doctor Of
Business Administration Victoria Graduate School Of Business Faculty Of Business
And Law Victoria University
- Nindyanto, H. A. (2018). *Strategi Pengembangan Klaster UMKM Dengan Pendekatan
Business Model Canvas dan Manufacturing System Design* (Doctoral dissertation,
Institut Teknologi Sepuluh Nopember).
- Munizu, M. (2010). Pengaruh faktor-faktor eksternal dan internal terhadap kinerja
usaha mikro dan kecil (UMK) di Sulawesi Selatan. *Jurnal manajemen dan
kewirausahaan*, 12(1), 33-41.
- Sandra, A., & Purwanto, E. (2017). Pengaruh faktor-faktor eksternal dan internal
terhadap kinerja usaha kecil dan menengah di Jakarta. *Business Management Journal*,
11(1).
- Tambunan, T. (2002). Usaha kecil dan menengah di Indonesia: beberapa isu penting.
Salemba Empat.
- Drucker, Peter (1985),. *Innovation & Entrepreneurship*. Routledge Classics , London
- Mcgrath, R.G. & Macmillan, I. (2000). *The Entrepreneurial Mindset: Strategies for
Continuously Creating Opportunity in An Age of Unncertainty*. USA: Harvard
Business School Press
- Gupta, Visal K. (2015). Construction of Entrepreneurial Orientation: Dispute,
Demand, and Dare. *New England Journal of Entrepreneurship*. Vol. 18: No.1, Article
7
- Kirkley, W.W. (2016). Entrepreneurial Behavior: The Role of Value. *International
Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, Vol. 22 No. 3, Pp. 290-328
- Krueger, N., Sussan, F. (2017). Person-Level Entrepreneurial Orientation: Clues to
the ‘Entrepreneurial Mindset’? *International Journal of Business and
Globalisation*, Vol. 18, No. 3. 382-395
- Koe, W. (2016). The Relationship Between Individual Entrepreneurial Orientation
(IEO) and Entrepreneurial Intention. *Journal of Global Entrepreneurship
Research*. 6:13. 1-11 (Kuratko, dkk, 2015)

Prasetyawan, Y., Maulida, N., & Lutvitasari, M. R. (2018, April). The integration between business model canvas and manufacturing system design. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (Vol. 337, No. 1, p. 012061). IOP Publishing.

Wright, M., Nambisan, S., Wright, M., & Feldman, M. (2019). The digital transformation of innovation and entrepreneurship: Progress, challenges and key themes. *The digital transformation of innovation and entrepreneurship: Progress, challenges and key themes. Research Policy*, April, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.03.018>

Zimmerer Thomas et al (2008), *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil* Ed 5. Jakarta, Salemba Empat

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Jadwal Kegiatan Penelitian.

JADWAL PENELITIAN

KAJIAN STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM KOTA MAKASSAR BERBASIS
KLASTERISASI WILAYAH

| | ITEM KEGIATAN PENELITIAN | Maret | | | | April | | | | Mei | | | | Juni | | | | |
|---|----------------------------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-----|---|---|---|------|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 1 | Penyusunan Proposal & presentasi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Studi Pustaka dan Literatur | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Observasi lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Depth interview | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pelaku UKM | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Focus Group Discussion 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Focus Group Discussion 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Penyusunan kajian dan Pembahasan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Seminar laporan kemajuan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Seminar laporan Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Finalisasi Laporan Penelitian | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

LAMPIRAN 2. Profil Peneliti

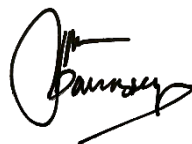
PROFIL PENELITIAN

Ketua Tim Peneliti/Anggota Tim Peneliti*)

Nama Lengkap : **DR. ANDI NUR BAU MASSEPE, SE.MM**
NIP : 197804282009121001
Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 28 APRIL 1978
Alamat : JL. Bumi Karsa 1 blok GA 10 No 5 Makassar
Jabatan (di Instansinya) : Dosen dan Peneliti
Nama Instansi : Fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Hasanuddin
Pendidikan Terakhir :Doktor Ilmu Manajemen. Feb Univ.Hasanuddin
Alamat e-mail : baumassepe@fe.unhas.ac.id dan massepe@gmail.com
No. Contact/HP :08124-2940124 / 081141-0 3334
Nomor Rekening Bank : .130-2-1-000054198-4
NPWP : 89 097 343 18 05 000.

Makassar, 2 Januari 2022

Yang Bersangkutan,



Andi Nur Bau Massepe

LAMPIRAN 3. PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DR.ANDI NUR BAU MASSEPE,SE,MM

NIP : 197804282009121001

Pangkat/Gol : Lektor / III C

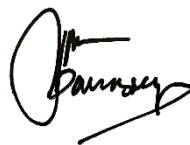
Asal PT : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
HASANUDDIN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa proposal penelitian ini adalah ASLI dan bukan merupakan hasil jiplakan (Plagiat) serta belum pernah dipublikasikan yang dibuat dan disusun oleh Tim Peneliti. Hasil penelitian ini nantinya akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Makassar untuk dapat diimplementasikan.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, .20 Maret 2022

Ketua Tim Peneliti



Dr.Andi Nur Bau Massepe, SE,M